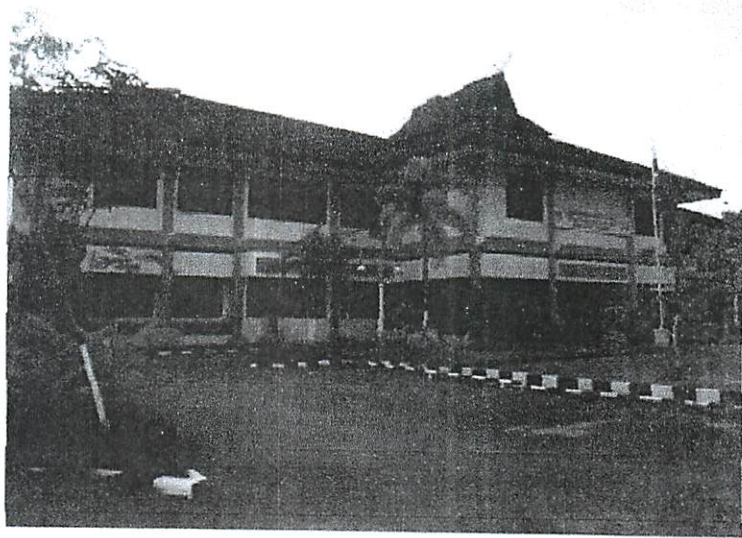


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2013**

**DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KOTA BALIKPAPAN**



**DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Berakhirnya Implementasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2013 diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan yaitu "Terwujudnya Tata Ruang Kota yang Produktif dan Berkelanjutan".

LAKIP ini secara garis besar berisi Informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian terget dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2013, termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran strategis program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kualitas perumahan di kawasan permukiman kumuh
2. Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (Rusunami dan Rusunawa)
3. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat
4. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang

Sangat disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolak ukur terhadap peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan sebagai wujud pertanggung jawabannya kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

Balikpapan, Februari 2014

Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan
Kota Balikpapan



[Handwritten signature]

MUHAIMIN

Pembina Tk. I

NIP. 19681008 199503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
C. ASPEK STRATEGIS	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	2
E. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGI	7
1. VISI DAN MISI	7
2. TUJUAN DAN SASARAN	8
3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	9
4. RENCANA KINERJA TAHUN 2013.....	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	11
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	17
BAB IV PENUTUP	18
A. KESIMPULAN	18
B. SARAN	19

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
2. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2013
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar pembentukan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan. Sebelumnya Dinas Tata Kota dan Perumahan bernama Dinas Penataan Kota dan Permukiman Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 3 Tahun 2001.

Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang penataan kota dan perumahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan

1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, tugas pokok dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang penataan kota dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008, fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penataan kota dan perumahan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dibidang penataan kota dan perumahan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang tata ruang dan tata bangunan;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perumahan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan bangunan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksana unit pelaksanaan teknis dinas;
- h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. ASPEK STRATEGIS

- 1. Meningkatnya Kualitas Perumahan di kawasan Permukiman Kumuh
- 2. Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (Rusunawa dan Rusunami)
- 3. Terwujudnya Sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh kapisan masyarakat.
- 4. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berkawasan lingkungan dan berkelanjutan.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan ditunjang dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat membawahkan :**
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan membawahkan :**
 - a. Seksi Tata Ruang; dan
 - b. Seksi Tata Bangunan
- 4. Bidang Perumahan membawahkan :**
 - a. Seksi Penataan Perumahan Swadaya; dan
 - b. Seksi Penataan Perumahan Formal.
- 5. Bidang Pengawasan Bangunan membawahkan :**
 - a. Seksi Pengawasan Bangunan Perumahan dan Permukiman; dan
 - b. Seksi Pengawasan Bangunan Umum.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :

- a. UPT Rumah Susun Sewa.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber Daya Manusia

Dinas Tata Kota dan Perumahan Per 31 Desember 2013 memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 68 (Enam puluh delapan) orang. Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1 Tingkat Pendidikan SDM Dinas Tata Kota dan Perumahan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)
1.	Pasca Sarjana (S2)	8	11,76
2.	Sarjana (S1)	21	30,88
3.	Sarjana Muda (D3)	8	11,76
4.	SLTA	28	41,17
5.	SLTP/SD	3	4,41
J U M L A H		68	100

2. Berdasarkan Pangkat / Golongan

Tabel 2 Pangkat / Golongan SDM Dinas Tata Kota dan Perumahan

No.	Golongan	Jumlah	(%)
1.	IV	6	8,8
2.	III	23	33,82
3.	II	16	23,52
4.	I	3	4,41
5.	Honor Daerah	-	-
6.	THL	4	5,88
7.	Naban	16	23,52
J U M L A H		68	100

3. Berdasarkan Eselon

Tabel 3 Eselon SDM Dinas Tata Kota dan Perumahan

No.	Eselon	Jumlah	(%)
1.	II	1	6,25
2.	III	4	25
3.	IV	11	68,75
J U M L A H		16	100

4. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4 SDM Dinas Tata Kota dan Perumahan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	(%)
1.	Laki – laki	49	72,05
2.	Perempuan	19	27,94
Jumlah		68	100

Pendidikan dan Pelatihan

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung tugas-tugas dibidang penataan ruang dan permukiman yang ke depan semakin banyak tantangan, maka beberapa pegawai telah diikutsertakan dalam berbagai diklat, baik struktural maupun fungsional.

a. Diklat Struktural

Sepanjang tahun 2013 Diklat Pim II : - orang, Pim III : 2 orang, (1. Ir. H. Abidinsyah Idris, 2. Ir. Syafaruddin.MT) Pim IV : 2 orang (1. Kurniawaty.ST, 2. Sudarni), Ada 2 (Dua) pegawai Dinas Tata Kota dan Perumahan yang mengikuti diklat yaitu Diklat Prajabatan (1. Biyadi, 2. Hairuddin).

b. Diklat Fungsional

Sepanjang tahun 2013 pegawai Dinas Tata Kota dan Perumahan yang mengikuti diklat fungsional yaitu :

- Bintelk Perpres No. 70 tahun 2012 ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (yang diikuti 7 orang, 1. Nur Saenab,ST, 2. Revi Citraewaty,HS.ST, 3. Frisda Sfarliana,ST, 4. Agus Rudi,ST, 5. Agus Surawan,A.Md, 6. Sukariant, 7. Puji Raharjo) yang lulus 1 orang yaitu : Puji Raharjo.

- Mengikuti Diklat Analisis Jabatan .

Disamping mengikut sertakan beberapa pegawai untuk mengikuti diklat fungsional dan struktural, maka upaya yang dilakukan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi, baik untuk jenjang Sarjana Muda (D3), Sarjana (S1), maupun Pasca Sarjana (S2). Hingga akhir Tahun Anggaran 2013 ini pegawai yang mengikuti program S2 : 2 orang. (1. Siti Patimah..ST, 2. Gina Nawangwulan.ST).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam Penyusunan LAKIP ini adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 - C. ASPEK STRATEGIS
 - D. STRUKTUR ORGANISASI
 - E. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
 - A. RENCANA STRATEGI
 - 1. VISI DAN MISI
 - 2. TUJUAN DAN SASARAN
 - 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013
 - B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 - C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA
 - B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

- BAB IV PENUTUP
 - A. KESIMPULAN
 - B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- 2. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
- 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

BAB II

RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan yaitu **"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Didukung Oleh Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Masyarakat Yang Beriman, Sejahtera, Religius dan Berperadapan Maju (Madinatul Iman)"**. maka Visi Dinas Tata Kota dan Perumahan Balikpapan adalah :

**" TERWUJUDNYA TATA RUANG KOTA
YANG PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN**

2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN	SASARAN
Menciptakan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni	Meningkatkan Kualitas perumahan di kawasan permukiman kumuh
	Mewujudkan Penyediaan hunian vertikal
	Mewujudkan sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat
Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang	Meningkatnya kualitas penataan ruang
Menyediakan struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan Luas wilayah budidaya
Meningkatkan kesesuaian dengan rencana tata ruang	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap tata ruang kota
Menerapkan ketertiban tata bangunan	Meningkatnya kesadaran akan bangunan yang aman dan nyaman
Meningkatkan Kinerja aparatur dan optimalisasi pelayanan pada masyarakat	Implementasi SPM dan Pemberian pelayanan prima bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang serta bangunan
	Kedisiplinan Pegawai

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan dalam melaksanakan Tugas-tugas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2011-2016.

Untuk mewujudkan rencana strategis tentu perlu ditunjang oleh visi dan misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan visi dan misi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman sehat jasmani dan memiliki daya saing dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mewujudkan tersedianya infrastruktur kota yang mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan fungsi kota di masa depan.
3. Mewujudkan kondisi kota yang layak huni dan berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan perekonomian kota yang berorientasi kepada pengembangan potensi ekonomi kerakyatan dan pengembangan berbasis ekonomi kota di masa depan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
6. Mewujudkan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Sasaran Strategis yang ingin dicapai Dinas Tata Kota Dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2013 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGI		INDIKATOR KINERJA	TARGET
01.Meningkatkan Kualitas Perumahan di kawasan kumuh	1.1	Jumlah Rumah tidak layak huni	1%
	1.2	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana PNS Kota Balikpapan	200 unit
02.Terwujudnya Penyediaan Hunian Vertikal (Rusunami dan Rusunawa)	2.1	Jumlah Rusunami	1 Rusunami
	2.2	Jumlah Rusunawa	1 Rusunawa
03.Terwujudnya Sanitasi Sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	3.1	Presentasi Rumah Tinggal Bersanitasi	1%
04.Terkendalinya Permanaftaan Ruang	4.1	Prosentase Bangunan Ber-IMB Dengan Satuan Bangunan	33 %
	4.2	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang	84 %
	4.3	Jumlah Bangunan Umum	300 B
	4.4	Jumlah Bangunan Perumahan	500B

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN

Tahun : 2011-2016

1. NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

KOTA BALIKPAPAN

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kualitas Perumahan di kawasan permukiman kumuh	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 2. Jumlah Pembangunan Rumah sederhana PNS Kota Balikpapan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2.	Terwujudnya penyediaan hunian Vertikal (Rusunawa dan Rusunami)	1. Jumlah Rusunami 2. Jumlah Rusunawa	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
3.	Terwujudnya Sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	1. Prosentase Rumah Tinggal bersanitasi 2. Prosentase Kawasan Kumuh terhadap Kawasan permukiman	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
4.	Tersedianya Struktur dan Pola Ruang yang berkawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Jumlah Rencana tata ruang Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah 2. Prosentase Rencana tata ruang Kota Balikpapan 3. Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
5. 6.	Tersediannya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	4. Jumlah Luas Wilayah Hutan Lindung	Laporan Hasil Kegiatan
		5. Jumlah Luas Wilayah Ruang Terbuka Hijau	Laporan Hasil Kegiatan
		1. Jumlah Luas Wilayah Budidaya Pesisir	Laporan Hasil Kegiatan
		1. Presentase Bangunan ber- IMB dengan satuan Bangunan	Laporan Hasil Kegiatan
		2. Presentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan Rencana tata ruang	Laporan Hasil Kegiatan
		3. Jumlah Bangunan Umum	Laporan Hasil Kegiatan
		4. Jumlah Bangunan Perumahan	Laporan Hasil Kegiatan

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA : Dinas Tata Kota dan Perumahan
Kota Balikpapan
TAHUN ANGGARAN : 2013

SASARAN STRATEGI		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1. Meningkatkan Kualitas Perumahan di kawasan Permukiman kumuh	1.1	Jumlah Rumah tidak layak huni	1%	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN 1. Penataan lahan siap Bangun	Rp 950.000.000
	1.2	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana PNS Kota Balikpapan	200 unit	2. Perencanaan Fasilitas Terpadu Kawasan Perumahan	Rp 300.000.000
				3. Sosialisasi dan penetapan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan	Rp 250.000.000
				4. Penyusunan Rencana Rinci Kasiba dan Lisiba	Rp 500.000.000
2. Terwujudnya Penyediaan Hunian Vertikal (Rusunami dan Rusunawa)	2.1	Jumlah Rusunami	1 Rusunami	1. Pembangunan Rusunawa	Rp 16.600.000.000
	2.2	Jumlah Rusunawa	1 Rusunawa	2. Pembangunan Rusunawa	Rp 16.600.000.000
3. Terwujudnya Sanitasi Sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	3.1	Presentasi Rumah Tinggal Bersanitasi	1%	1. Pemyirangan dan Penyempurnaan Drainase Perumahan Korpri KM 7	Rp 1.600.000.000
				2. Pengadaan Pagar dan jarring pengaman Rusunawa	Rp 600.000.000
				3. Pemeliharaan dan Opsional Rusunawa	Rp 900.000.000
				4. Implementasi Penataan Kawasan Kumuh	Rp 4.044.000.000
				5. Pembangunan Fasilitas Pelengkap/ Penghubung	Rp 757.500.000
				6. Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Rp 313.100.000
4. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	4.1	Prosentase Bangunan Ber-IMB Dengan Satuan Bangunan	33%	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN 1. Sosialisasi dan pendatan dibagian pengawasan Bangunan	Rp 195.000.000
	4.2	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang	84%	2. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	
	4.3	Jumlah Bangunan Umum	300 B	1. Pengembangan Jaringan Kerja	Rp 135.350.000
	4.4	Jumlah Bangunan Perumahan	500 B	2. Pengadaan Papan Himbauan dan Peringatan di Bidang Pengawasan 3. Peningkatan Bagi Pengawas	Rp 454.500.000

JUMLAH ANGGARAN Rp 21,385,594.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Untuk penentuan bobot Indikator Kinerja (*input*, *proses*, *output* dan *outcome*), kegiatan, program dan kebijaksanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator yang menunjukkan *outcome* diberi bobot lebih tinggi dari *output*, *proses* dan *input*. Begitu juga selanjutnya indikator *output* diberi bobot lebih besar dari *proses* dan *input*;
2. Indikator yang menjadi tanggung jawab utama dari instansi dan dapat dikendalikan (*controlable*) diberi bobot lebih tinggi dari pada indikator yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable*);
3. Kegiatan yang lebih utama dan erat kaitannya dalam pencapaian visi, misi serta memiliki bobot kerja yang lebih besar ditinjau dari resiko pencapaian maupun dana yang ada, diberikan bobot lebih tinggi dari kegiatan lain;
4. Program yang memiliki kegiatan lebih banyak dan memiliki dana lebih besar serta lebih strategis dalam pencapaian visi dan misi diberikan bobot lebih tinggi;
5. Kebijakan yang memiliki program lebih banyak dan sifatnya strategis dalam pencapaian visi dan misi diberikan bobot lebih tinggi dari kebijakan lain.

Pencapaian Kinerja Dinas Tata Kota dan Perumahan dapat dilihat dalam table Berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	PENCAPAIAN TARGET (%)
		URAIAN	SATUAN	TARGET		
1	Meningkatkannya Kualitas Perumahan di kawasan permukiman kumuh	1. Jumlah Rumah Tidak Layak	%	1%	0.03 %	3%
		2. Jumlah Pembangunan Rumah sederhana PNS Kota Balikpapan	Unit	200 Unit	179	89,50%

Berdasarkan uraian sasaran strategis no 1 yaitu dengan meningkatnya kualitas perumahan di kawasan permukiman kumuh, maka permukiman mesyarakat menjadi lebih baik, sehingga kehidupan di masyarakat menjadi lebih baik dan sehat sejahtera.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	PENCAPAIAN TARGET (%)
		URAIAN	SATUAN	TARGET		
2.	Terwujudnya penyediaan Hunian Vertikal (Rusunami dan Rusunawa)	1. Jumlah Rusunami	Unit	1 Rusunami	1 TB	100%
		2. Jumlah Rusunawa	Unit	1 Rusunawa	1 TB	100%

Berdasarkan Uraian sasaran strategis no 2 yaitu dengan Terwujudnya Penyediaan Hunia Vertikal (Rusunami dan Rusunawa), maka Tata Ruang kota lebih tertata rapi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	PENCAPAIAN TARGET (%)
		URAIAN	SATUAN	TARGET		
3.	Terwujudnya Sanitasi sehat yang Dapat Diakses seluruh lapisan masyarakat	1. Prosentase rumah tinggal bersanitasi	Unit	1%	0.05 %	5%

Berdasarkan Uraian sasaran strategis no 3 yaitu dengan Terwujudnya Sanitasi Sehat yang dpat di akses seluruh lapisan mayarakat, maka kehidupan serta lingkungan di masyarakat menjadi lebih bersih dan masyarakat menjadi lebih sehat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	PENCAPAIAN TARGET (%)
		URAIAN	SATUAN	TARGET		
4.	Terkendalnya Pemanfaatan ruang	1. Prosentase Bangunan ber-IMB dengan satuan bangunan	%	33%	35%	106.06%
		2. Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	84%	86%	102,38%
		3. Jumlah Bangunan Umum	%	300 B	472	157,33%
		4. Jumlah Bangunan Perumahan	%	500 B	1.345	269%

Berdasarkan Uraian Sasaran strategis No 4 Yaitu dengan terkendalnya pemanfaatan ruang, maka lingkungan serta kehidupan masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana tata ruang kota

Tabel Perbandingan Capaian tahunan persasaran

NO	SASARAN		INDIKATOR	2012	2013
1	Meningkatkan Kualitas Perumahan di kawasan Permukiman kumuh	1.1	Jumlah Rumah tidak layak huni	0,1%	0,1%
		1.2	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana PNS Kota Balikpapan	154 Unit	200 Unit
2	Terwujudnya Penyediaan Hunian Vertikal (Rusunami dan Rusunawa)	2.1	Jumlah Rusunami	0	1 Rusunami
		2.2	Jumlah Rusunawa	0	1 Rusunawa
3	Terwujudnya Sanitasi Sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	3.1	Presentasi Rumah Tinggal Bersanitasi	1%	1%
4	Terkendalinya Permanfaatan Ruang	4.1	Prosentase Bangunan Ber-IMB Dengan Satuan Bangunan	32%	33%
		4.2	Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang	82%	84%
		4.3	Jumlah Bangunan Umum	300 B	300 B
		4.4	Jumlah Bangunan Perumahan	500 B	500 B

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian Akuntabilitas Keuangan Persasaran :

NO	SASARAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Meningkatkan Kualitas Perumahan di kawasan Permukiman kumuh	Rp 885.875.200	Rp 781.780.580	88,45
2	Terwujudnya Penyediaan Hunian Vertikal (Rusunami dan Rusunawa)	Rp 4.225.584.300	Rp 3.596.471.090	85,11
3	Terwujudnya Sanitasi Sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	Rp 2.430.720.000	Rp 2.102.557.180	86,50
4	Terkendalinya Permanfaatan Ruang	Rp 9.934.351.400	Rp 2.551.663.405.60	25,69

❖ *Belanja Langsung*

Alokasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2013 sebesar Rp. 23.087.631.500,- dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 dapat direalisasikan sebesar Rp. 20.026.327.812,20 atau 86,74 % , Sisa anggaran sejumlah Rp. 3.061.303.687,80

❖ *Belanja Tidak Langsung*

Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dalam Tahun Anggaran 2013 ini sebesar Rp. 5.422.993.000,- sampai dengan akhir Tahun Anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.623.017.064,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 799.975.936,- atau 85,25 %.

Tabel 5 Realisasi Belanja Tidak Langsung

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1.	Belanja Pegawai dan Tunjangan Lainnya.	5.422.993.000,-	4.623.017.064,-	85,25	799.975.936,-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas – tugas pokok dan fungsi yang selama ini dijalankan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maupun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tata Kota dan Perumahan.

1. Dengan Meningkatnya Kualitas Perumahan Dikawasan Permukiman Kumuh, maka permukiman masyarakat menjadi sehat sejahtera.
2. Kemudian dengan terwujudnya penyediaan Huan Vertikal (Rusunami dan Rusunawa), Sehingga Pemanfaatan tata ruang kota lebih tertata rapi.
3. Kemudian dengan terwujudnya Sanitasi sehat yang dapat diakses Seluruh Lapisan Masyarakat, maka lingkungan permukiman.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- ⇒ Diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- ⇒ Masih terbatasnya sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas para pegawai dalam menjalankan kewajibannya.
- ⇒ Kurangnya daya listrik untuk menunjang operasional kantor.

Guna mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diambil langkah – langkah sebagai berikut :

- ⇒ Memberikan kesempatan kepada semua pegawai DTKP Kota Balikpapan untuk mengembangkan SDM-nya dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan maupun dilaksanakan oleh pihak luar, misalnya : Perguruan Tinggi, swasta dan instansi lainnya.
- ⇒ Mengusulkan tambahan sarana dan prasarana operasional, yaitu
 - Komputer
 - Laptop

- Printer
- GPS
- Kendaraan Operasional (roda 2 dan roda 4)
- Kursi (kerja dan tamu)
- Rak Penyimpan File
- Meja Kerja
- Kursi dll

⇒ Penambahan daya listrik untuk menunjang operasional kantor, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan lebih optimal.

B. Saran

- ❖ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan, merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Kota dan Perumahan Balikpapan Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Goverment* yang melibatkan *stake holders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.

Balikpapan, Februari 2014

Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan
Kota Balikpapan



MUHAIMIN

Pembina Tk. I

NIP. 19681008 199503 1 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Jl. Ruhui Rahayu I No. 10 Telp. (0542) 874091 Fax. (0542) 874085
Balikpapan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 050/143/DTKP-Set /V/2013

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN.

- Menimbang : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RFNSTRA Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengatur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya.
- b. Bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintahan Antara pemerintah, pemerintah urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014).
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tentang Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atau Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian atau Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 Tanggal 8 Oktober 2008).
10. Perda Npmor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.
11. Peraturan Walikota Balikpapan, Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, Tugas pokok dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan adalah melaksanakan Urusan Rumah tangga Daerah dibidang penataan Kota dan Perumahan Berdasarkan asas dan tugas pembantuan.
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTABALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan yang Berisi Sasaran Strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Perumahan di kawasan permukiman Kumuh	1. Jumlah rumah tidak layak huni	Laporan Pelaksanaan kegiatan
2.	Terwujudnya penyediaan hunian vertical (Rusunawa dan Rusunami)	2. Jumlah pembangunan rumah sederhana PNS Kota Balikpapan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
3.	Terwujudnya Sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.	1. Jumlah Rusunami	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
		2. Jumlah Rusunawa	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
		1. Prosentase rumah tinggal bersanitasi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
		2. Prosentase Kawasan kumuh terhadap kawasan permukiman	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

4.	Tersedianya struktur dan pola ruang yang berkawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Jumlah Rencana tata ruang kota Balikpapan menjadi menjadi peraturan daerah 2. Prosentase rencana tata ruang Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah 3. Jumlah dokumen perencanaan tata ruang 4. Jumlah luas wilayah hutan lindung 5. Jumlah luas wilayah ruang terbuka hujan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan
5.	Tersedianya tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Jumlah luas wilayah budidaya pesisir	Laporan Hasil Kegiatan
6.	Terkendalinya pemanfaatan ruang	1. Prosentase bangunan ber-IMB dengan satuan bangunan 2. Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 3. Jumlah Bangunan Umum 4. Jumlah Bangunan Perumahan	Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan Laporan Hasil Kegiatan

Pasal 2

Unit kerja lingkungan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacupada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : Mei 2013

Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan
Kota Balikpapan



[Signature]
Ir. MUHAJMIN.MT
Pembina Tk. I
NIP. 19681008 199503 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAIMIN**

Jabatan : **KEPALA DTKP KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,

MUHAIMIN

PENGUKURAN KINERJA

Unit organisasi : Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan
Tahun Anggaran : 2013

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatkan Kualitas Perumahan di Kawasan Permukiman Kumuh	1.1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	1%	0,03%	3%	Rp. 145.387.600	Rp. 130.837.440	98,73
	1.2 Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana PNS Kota Balikpapan	200 Unit	179	89,50%	Rp. 740.487.600	Rp. 650.943.140	87,91
2. Terwujudnya Penyediaan Hunian Vertikal (Rusunami dan Rusunawa)	2.1 Jumlah Rusunami	1 Rusunami	1 TB	100%	-	-	-
	2.2 Jumlah Rusunawa	1 Rusunawa	1 TB	100%	Rp. 4.225.584.300	Rp. 3.596.471.090	85,11
3. Terwujudnya Sanitasi Sehat Yang Dapat Diakses Seluruh Lapisan Masyarakat	3.1 Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi	1%	0,05	5%	Rp. 2.430.720.000	Rp. 2.102.557.180	86,50
4. Terkendalinya Permanfaatan Ruang	4.1 Prosentase Bangunan Ber-IMB Dengan Satuan Bangunan	33%	35%	106,06%	Rp. 752.880.000	Rp. 519.573.786,60	84,81
	4.2 Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang	84%	86%	102,38%	Rp. 1.560.180.000	Rp. 1.474.316.954	94,50
	4.3 Jumlah Bangunan Umum	300 B	472	157,33%	Rp. 704.106.400	Rp. 551.100.470	78,27
	4.4 Jumlah Bangunan Perumahan	500 B	1,345	269	Rp. 6.917.185.000	Rp. 6.672.195	96,46